



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 475/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan tata laksana serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta perannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;
- b. bahwa tim analisis jabatan dan analisis beban kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan analisis terhadap jabatan dan analisis beban kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Pelaksana Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. jumlah kebutuhan;
  - b. peta jabatan; dan
  - c. uraian jabatan.
- KETIGA** : Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tercantum dalam *google drive* dengan link:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1c7XODojTxUXKGfcmsVcb8H60viiwcM1R> .
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 336/KEP/HK/2022 Tentang Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat /Pegawai Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 475/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 2 Desember 2025  
TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN  
MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN  
(EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Inspektur	1827	1	1	0	0			1.46	A (Sangat Baik)
2	Auditor Ahli Utama	4437	3	0	0	-3	3 Orang		3.55	A (Sangat Baik)
3	Arsiparis Terampil	4273	3	3	0	0			1.14	A (Sangat Baik)
4	Perencana Ahli Pertama	6768	5	5	0	0			1.08	A (Sangat Baik)
5	Perencana Ahli Muda	4272	3	1	0	-2	2 Orang		3.42	A (Sangat Baik)
6	Perencana Ahli Madya	1800	1	0	0	-1	1 Orang		1.44	A (Sangat Baik)
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	4441	3	2	0	-1	1 Orang		1.78	A (Sangat Baik)
8	Pranata Komputer Ahli Muda	3142	2	0	0	-2	2 Orang		2.51	A (Sangat Baik)
9	Sekretaris Inpektorat Provinsi NTT	1817	1	1	0	0			1.45	A (Sangat Baik)
10	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan	1864	1	1	0	0			1.49	A (Sangat Baik)
11	Penelaah Teknis Kebijakan	1821	1	0	0	-1	1 Orang		1.46	A (Sangat Baik)
12	Pengadministrasi Perkantoran	20392	15	4	11	0			3.95	A (Sangat Baik)
13	Pengolah Data Dan Informasi	4465	3	0	0	-3	3 Orang		3.57	A (Sangat Baik)



No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Operator Layanan Operasional	4320	3	0	0	-3	3 Orang		3.46	A (Sangat Baik)
15	Inspektur Pembantu I	1791	1	1	0	0			1.43	A (Sangat Baik)
16	Auditor Terampil	3032	2	1	0	-1	1 Orang		2.43	A (Sangat Baik)
17	Auditor Mahir	6751	5	1	0	-4	4 Orang		4.6	A (Sangat Baik)
18	Auditor Penyelia	5401	4	0	0	-4	4 Orang		3.57	A (Sangat Baik)
19	Auditor Ahli Pertama	3064	2	2	0	0			1.23	A (Sangat Baik)
20	Auditor Ahli Muda	8240	6	5	0	-1	1 Orang		1.32	A (Sangat Baik)
21	Auditor Ahli Madya	4436	3	2	0	-1	1 Orang		1.77	A (Sangat Baik)
22	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	9529	7	5	0	-2	2 Orang		1.52	A (Sangat Baik)
23	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	5402	4	2	0	-2	2 Orang		2.15	A (Sangat Baik)
24	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	1828	1	0	0	-1	1 Orang		1.46	A (Sangat Baik)
25	Penelaah Teknis Kebijakan	2956	2	2	0	0			1.18	A (Sangat Baik)
26	Inspektur Pembantu II	1848	1	0	0	-1	1 Orang		1.48	A (Sangat Baik)
27	Auditor Terampil	4294	3	0	0	-3	3 Orang		3.43	A (Sangat Baik)
28	Auditor Mahir	3064	2	1	0	-1	1 Orang		2.45	A (Sangat Baik)

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Auditor Penyelia	5401	4	0	0	-4	4 Orang		3.57	A (Sangat Baik)
30	Auditor Ahli Pertama	1884	1	1	0	0			1.51	A (Sangat Baik)
31	Auditor Ahli Muda	7013	5	5	0	0			1.12	A (Sangat Baik)
32	Auditor Ahli Madya	5707	4	3	0	-1	1 Orang		1.52	A (Sangat Baik)
33	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	5670	4	4	0	0			1.13	A (Sangat Baik)
34	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	5658	4	2	0	-2	2 Orang		2.26	A (Sangat Baik)
35	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	1838	1	1	0	0			1.47	A (Sangat Baik)
36	Penelaah Teknis Kebijakan	1811	1	0	0	-1	1 Orang		1.45	A (Sangat Baik)
37	Inspektur Pembantu III	1820	1	0	0	-1	1 Orang		1.46	A (Sangat Baik)
38	Auditor Terampil	4050	3	0	0	-3	3 Orang		2.67	A (Sangat Baik)
39	Auditor Mahir	1851	1	1	0	0			1.48	A (Sangat Baik)
40	Auditor Penyelia	3128	2	0	0	-2	2 Orang		2.5	A (Sangat Baik)
41	Auditor Ahli Pertama	4405	3	3	0	0			1.17	A (Sangat Baik)
42	Auditor Ahli Muda	9456	7	4	0	-3	3 Orang		1.68	A (Sangat Baik)



No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Auditor Ahli Madya	4405	3	3	0	0			1.17	A (Sangat Baik)
44	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8238	6	5	0	-1	1 Orang		1.32	A (Sangat Baik)
45	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	3074	2	2	0	0			1.23	A (Sangat Baik)
46	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	3057	2	0	0	-2	2 Orang		2.45	A (Sangat Baik)
47	Penelaah Teknis Kebijakan	1698	1	1	0	0			1.36	A (Sangat Baik)
48	Fasilitator Pemerintahan	1854	1	1	0	0			1.48	A (Sangat Baik)
49	Inspektur Pembantu IV	1855	1	1	0	0			1.48	A (Sangat Baik)
50	Auditor Terampil	2825	2	0	0	-2	2 Orang		2.26	A (Sangat Baik)
51	Auditor Mahir	1788	1	0	0	-1	1 Orang		1.43	A (Sangat Baik)
52	Auditor Penyelia	1788	1	1	0	0			1.43	A (Sangat Baik)
53	Auditor Ahli Pertama	3082	2	2	0	0			1.23	A (Sangat Baik)
54	Auditor Ahli Muda	8102	6	3	0	-3	3 Orang		2.13	A (Sangat Baik)
55	Auditor Ahli Madya	4405	3	3	0	0			1.17	A (Sangat Baik)
56	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	9503	7	6	0	-1	1 Orang		1.27	A (Sangat Baik)



No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	3138	2	2	0	0			1.25	A (Sangat Baik)
58	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	1904	1	0	0	-1	1 Orang		1.52	A (Sangat Baik)
59	Penelaah Teknis Kebijakan	1683	1	1	0	0			1.35	A (Sangat Baik)
60	Inspektur Pembantu V	1829	1	1	0	0			1.46	A (Sangat Baik)
61	Auditor Terampil	4050	3	0	0	-3	3 Orang		2.67	A (Sangat Baik)
62	Auditor Mahir	1724	1	0	0	-1	1 Orang		1.38	A (Sangat Baik)
63	Auditor Penyelia	2701	2	0	0	-2	2 Orang		1.77	A (Sangat Baik)
64	Auditor Ahli Pertama	3066	2	2	0	0			1.23	A (Sangat Baik)
65	Auditor Ahli Muda	6831	5	4	0	-1	1 Orang		1.37	A (Sangat Baik)
66	Auditor Ahli Madya	4405	3	1	0	-2	2 Orang		3.52	A (Sangat Baik)
67	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8276	6	5	0	-1	1 Orang		1.32	A (Sangat Baik)
68	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	4244	3	3	0	0			1.13	A (Sangat Baik)
69	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	1904	1	1	0	0			1.52	A (Sangat Baik)



No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Penelaah Teknis Kebijakan	3110	2	2	0	0			1.24	A (Sangat Baik)
71	Fasilitator Pemerintahan	1842	1	1	0	0			1.47	A (Sangat Baik)
Jumlah		286726	201	115	11	-75	75 Orang	0 Orang		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**INSPEKTUR**  
IV/c(Pembina Utama Muda) -  
IV/d(Pembina Utama Madya)

IV/c(Pembina Utama Muda) - Teknik Sipil  
Kelas 15

**SEKRETARIS INPEKTORAT PROVINSI NTT**  
IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I)

IV/b(Pembina Tk.I) - Teknik Sipil  
Kelas 12

**INSPEKTUR PEMBANTU I**  
IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I)

IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Sumber Daya Manusia  
Kelas 12

**INSPEKTUR PEMBANTU II**  
IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I)

Kelas 12

**INSPEKTUR PEMBANTU III**  
IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I)

Kelas 12

**INSPEKTUR PEMBANTU IV**  
IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I)

IV/b(Pembina Tk.I) - SDM  
Kelas 12

**INSPEKTUR PEMBANTU V**  
IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I)

IV/b(Pembina Tk.I) - Teknik Sipil  
Kelas 12

**JABATAN FUNGSIONAL**

	Kls	B	K	+/-
AUDITOR AHLI UTAMA	14	0	3	-3
ARSIPARIS TERAMPIL	6	3	3	0
PERENCANA AHLI PERTAMA	8	5	5	0
PERENCANA AHLI MUDA	10	1	3	-2
PERENCANA AHLI MADYA	12	0	1	-1
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	2	3	-1
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	0	2	-2

**KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN**  
III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata)

IV/a(Pembina) - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan  
Kelas 9

**JABATAN PELAKSANA**

	Kls	B	K	+/-
PENELAIAH TEKNIK KEBIDAKAN	7	2	2	0

**JABATAN FUNGSIONAL**

	Kls	B	K	+/-
AUDITOR TERAMPIL	6	1	2	-1
AUDITOR MAHIR	7	1	5	-4
AUDITOR PENYELIA	9	0	4	-4
AUDITOR AHLI PERTAMA	8	2	2	0
AUDITOR AHLI MUDA	10	5	6	-1
AUDITOR AHLI MADYA	12	2	3	-1
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	5	7	-2
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA	10	2	4	-2
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA	12	0	1	-1

**JABATAN PELAKSANA**

	Kls	B	K	+/-
PENELAIAH TEKNIK KEBIDAKAN	7	0	1	-1
FASILITATOR PEMERINTAHAN	7	1	1	0

**JABATAN FUNGSIONAL**

	Kls	B	K	+/-
AUDITOR TERAMPIL	6	0	3	-3
AUDITOR MAHIR	7	1	1	0
AUDITOR PENYELIA	9	0	2	-2
AUDITOR AHLI PERTAMA	8	3	3	0
AUDITOR AHLI MUDA	10	4	7	-3
AUDITOR AHLI MADYA	12	3	3	0
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	5	6	-1
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA	10	2	2	0
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA	12	0	2	-2

**JABATAN PELAKSANA**

	Kls	B	K	+/-
PENELAIAH TEKNIK KEBIDAKAN	7	1	1	0

**JABATAN FUNGSIONAL**

	Kls	B	K	+/-
AUDITOR TERAMPIL	6	0	2	-2
AUDITOR MAHIR	7	0	1	-1
AUDITOR PENYELIA	9	1	1	0
AUDITOR AHLI PERTAMA	8	2	2	0
AUDITOR AHLI MUDA	10	3	6	-3
AUDITOR AHLI MADYA	12	3	3	0
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	6	7	-1
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA	10	2	2	0
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA	12	0	1	-1

**JABATAN PELAKSANA**

	Kls	B	K	+/-
PENELAIAH TEKNIK KEBIDAKAN	7	2	2	0
FASILITATOR PEMERINTAHAN	7	1	1	0

**JABATAN FUNGSIONAL**

	Kls	B	K	+/-
AUDITOR TERAMPIL	6	0	3	-3
AUDITOR MAHIR	7	0	1	-1
AUDITOR PENYELIA	9	0	2	-2
AUDITOR AHLI PERTAMA	8	2	2	0
AUDITOR AHLI MUDA	10	4	5	-1
AUDITOR AHLI MADYA	12	1	3	-2
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	5	6	-1
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA	10	3	3	0
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA	12	1	1	0

Keterangan :





Kls : Kelas Jabatan

B : Bezzeting Pegawai

K : Kebutuhan Pegawai

+/- : Kelebihan dan Kekurangan Pegawai

</

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	

E. MELKIADES LAKA LENA